Jurnal HAM
Volume 14 Nomor 1, April 2023
p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Jurnal HAM merupakan sebuah platform ilmiah yang bertujuan untuk mendiseminasikan dan mengembangkan hasil-hasil riset hak asasi manusia baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Mengingat studi hak asasi manusia banyak melibatkan elemen-elemen keilmuan yang bersifat interdisipliner, Jurnal HAM menerima submisi artikel ilmiah yang membahas hak asasi manusia dari lensa, namun tidak terbatas pada ilmu hukum, ilmu sosial, politik, bahasa, hubungan internasional, hingga komunikasi. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36/E/KPT/2019 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode VII Tahun 2019 tanggal 13 Desember 2019, menetapkan bahwa Jurnal HAM mendapatkan peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2).

Pembina	:	Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Penanggung Jawab	:	Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pengarah	:	1. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan
Pemimpin Umum/Redaksi (*Chief Editor*)	:	Harison Citrawan Damanik, S.H., LL.M. (Penn State Dickinson Law, United States)
Anggota Dewan Redaksi (*Editorial Board*)	:	1. Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) 2. Ahyar Ari Gayo, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional) 3. Firdaus S.Sos., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional) 4. Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si (Badan Riset dan Inovasi Nasional) 5. Oki Wahju Budijanto, S.E., S.H., M.M. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) 6. Donny Michael Situmorang, S.H., M.H. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) 7. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) 8. Sabrina Nadilla, S.H. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) 9. Ganesh Cintika Putri, S.I.P, M.HRL. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM)
Editor Pelaksana (*Managing Editor*)	:	Fitriyani, S.H., M.Si. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM)

Asisten Editor (*Assisstant Editor*)	:	1. B. Lora Christyanti, S.I.P., M.H. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) 2. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) 3. Lindung Budi Mulyawan, S.H. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) 4. Amirah Balqis, S.H. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) 5. Novzel Ridho Abednego Hasugian, S.I.P. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) 6. Mira Sukmawati, S.I.P. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) 7. Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M. (Badan Pembinaan Hukum Nasional)
Teknologi dan Sistem Informasi	:	1. Haddryson, S.H., M.H. 2. Mochamad Arip, S.Kom. 3. Andi Rarung, S.H., M.H. 4. Agus Priyatna, S.Kom. 5. Fadillah Said, S.Kom. 6. Harysandy Permana, S.Kom. 7. Adi Octaviantara, A.Md. 8. Tegar Christopher Yolanda, S.I.P. 9. Imam Mahdi Nashif, S.Kom.

Alamat Redaksi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Gedung Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan (12940)
Telepon (021) 2525015 (ext. 514); (021) 2522952; Faksimile (021) 2522952
E-mail: ejournalham@gmail.com / pusbangdatin@gmail.com

Percetakan
PT Pohon Cahaya
Jl. Mandala Raya Selatan No. 20 A-B
Jakarta Barat, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan 11440
Telepon: 081391694388

Catatan:

Redaksi menerima naskah asli yang aktual dalam bidang Hak Asasi Manusia berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: Peneliti Hak Asasi Manusia, praktisi dan teoritisi serta kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan hasil penelitian terbaru yang memuat data dan fakta serta pendapat para ahli maupun pribadi penulisnya, bukan merupakan pendapat redaksi.

Redaksi berhak tidak menerima, menyingkat naskah tulisan yang dikoreksi dari segi teknis penulisan sepanjang tidak mengubah isi tulisan. Naskah tulisan dikirim melalui Open Journal System (OJS) pada laman ejournal.balitbangham.go.id.

Jurnal HAM
Volume 14 Nomor 1, April 2023
p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI iii
PENGANTAR REDAKSI v

Konstitusionalitas Hak Kesehatan Jiwa Warga Negara: Studi Kebijakan Penanggulangan Bunuh Diri di Kabupaten Gunungkidul
(*The Constitutionality of Citizens' Mental Health Rights: A Study of Suicide Prevention Policies in Gunungkidul Regency*) 1-14
Enggar Wijayanto

Reduksi Hak Partisipasi Publik pada Aturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Perizinan Berusaha di Indonesia: Perspektif Green Constitution
(*The Undermining of The Right to Public Participation in The Environmental Impact Analysis Regulation for a Business Permit in Indonesia: A Green Constitution Perspective*) 15-38
Aditya Prastian Supriyadi

Isomorfisme Institusional LPSK dalam Penegakan Hak Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana di Indonesia
(*Institutional Isomorphism at LPSK in Enforcement of The Rights to Psychosocial Rehabilitation for Victims of Crime in Indonesia*) 39-54
Mahari Is Subangun; Sudarsono Hadjosoekarto

Transpuan di Masa Pandemi: Hak, Akses dan Eksklusi
(*Transwomen in Pandemic: Rights, Access, and Exclusion*) 55-68
Muh. Wahyu, Abu Bakar; Muhammad Saleh Tajuddin

Gross Human Rights Violations Research Trend: A Bibliometric Analysis and Future of Research Agenda
(Tren Riset Pelanggaran HAM Berat: Analisis Bibliometrik dan Agenda Riset Masa Depan) 69-90
Iwan Santoso; Murtir Jeddawi; Yana Sahyana; Romli Arsyad; Alma'arif

The Social Construction of Transgender in Jember Regency After the Jember Fashion Carnival Event: a Human Rights Perspective
Konstruksi Sosial Transgender di Kabupaten Jember Pasca Acara Jember Fashion Carnival: Perspektif Hak Asasi Manusia 91-104
Muhammad Aenur Rosyid; Syamsul Anam

BIODATA PENULIS xv

Jurnal HAM
Volume 14 Nomor 1, April 2023
p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Redaksi dapat menerbitkan tulisan pada edisi kedua yaitu Jurnal HAM Volume 14 Nomor 1, April 2023. Pada volume ini, Jurnal HAM memperkenalkan nomenklatur baru, yaitu Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, pasca diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32). Berdasarkan peraturan yang ditetapkan dan diundangkan pada 22 Februari 2023 tersebut, nomenklatur baru digunakan untuk menggantikan nomenklatur lama, yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Kelengkapan teknis terkait perubahan nomenklatur, antara lain laman, email, dan sebagainya, sedang dipersiapkan secara bertahap dan akan diinformasikan kemudian.

Volume 14 Nomor 1, April 2023 kali ini, memuat 6 (enam) karya tulis ilmiah yang merupakan hasil-hasil penelitian maupun tinjauan ilmiah para peneliti. Edisi ini dibuka oleh tulisan yang mengulas tentang konsitusionalitas hak Kesehatan warga negara. Dengan menyoroti tingginya angka bunuh diri di Kabupaten Gunung Kidul, tulisan ini melihat implementasi hak konstitusional dalam upaya penguatan Kesehatan jiwa. Tulisan kedua membahas mengenai reduksi hak partisipasi publik pada aturan analisis mengenai dampak lingkungan untuk perizinan berusaha di Indonesia. Melalui konsep green constitution, tulisan ini mengkritisi pembatasan pelibatan masyarakat dalam memitigasi risiko kerugian akibat eksploitasi ekonomi. Tulisan ketiga menjelaskan secara rinci bagaimana isomorfisme terjadi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia. Tulisan keempat menjabarkan hak, akses, dan eksklusi transpuan di masa pandemi. Tulisan kelima menyajikan analisis tren penelitian terkait ham dengan mengidentifikasi negara, organisasi, dan penulis yang berkontribusi signifikan. Tulisan terakhir melihat bagaimana konstruksi sosial transpuan di Kabupaten Jember Pasca kegiatan Jember Fashion Carnival. Keenam tulisan tersebut menjelaskan secara kritis tentang isu-isu terkait dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Tulisan-tulisan tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang HAM bagi para pembaca.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah memberikan dukungan dalam penerbitan Jurnal HAM ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis. Kami juga menerima kritik dan saran dalam rangka peningkatan kualitas Jurnal HAM baik dari sisi pengelolaan Open Jurnal System maupun dari sisi materi tulisan.

Selamat Membaca

-Dewan Redaksi-

Jurnal HAM
Volume 14 Nomor 1, April 2023
p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

DEWAN REDAKSI JURNAL HAM MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI YANG TELAH MENELAAH NASKAH SEHINGGA DAPAT DITERBITKAN

1. Assoc. Prof. Khoo Ying Hooi
   Department of International and Strategic Studies Universiti Malaya, Malaysia
2. Dr. Ken M.P. Setiawan
   Asia Institute, Faculty of Art University of Melbourne, Australia
3. Dr. Sri Lestari Wahyuningroem
   Carr Center for Human Rights Policy, Harvard Kennedy School, United States
4. Prof. M. Alie Humaedi
   Organisasi Riset, Tata Kelola Pemerintahan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
   Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia
5. Prof. F.X. Adjie Samekto
   Fakultas Ilmu Sosial Universitas Diponegoro, Indonesia
6. Prof. Irwansyah
   Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia
7. Dr. Aprilina Pawestri
   Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Indonesia
8. Dr. Puguh Prasetya Utomo
   Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Indonesia
9. Eko Riyadi, M.H.
   Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Indonesia
10. Majda El-Muhtaj, M.Hum.
    Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Indonesia
11. Prakoso Bhairawa Putra, M.A.
    Pusat Riset Kebijakan Publik, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Jurnal HAM
Volume 14 Nomor 1, April 2023
p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Enggar Wijayanto (*Master of Sharia Studies, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*)

(The Constitutionality of Citizens' Mental Health Rights: A Study of Suicide Prevention Policies in Gunungkidul Regency)

Jurnal HAM, Volume 14, Number 1, April 2023, page 1-14

Gunungkidul Regency has a high suicide rate, prompting the Regional Head to publish Regent Regulation Number 56/2018 as a policy to deal with suicide cases. This measure is a concrete manifestation of systematically preventing mass suicides. The average figure, which ranges from 20 to 30 occurrences each year, demonstrates that suicide is no longer an individual issue, but rather a social-human catastrophe. This study examines the role of the state in preserving people' constitutional rights in the realm of mental health through the adoption of suicide prevention measures. To understand the purpose of the law, it employs an interdisciplinary approach as an integrated perspective. This study falls under empirical research and takes a socio-legal approach. Data is collected using primary sources such as interviews, observations, and documentation, as well as secondary sources such as the review of related literature. Based on a comparison of suicide rates before and after the policy was implemented, the results indicated that the suicide prevention policy did not perform optimally in terms of effectiveness. Apparatus coordination, facilities, and social support are all influencing variables. Aside from that, the pandemic situation also contributes to the situation. Suicide prevention policy, both conceptually and practically, is an endeavor to safeguard citizens' constitutional rights by enhancing the mental health aspects of the community through the integration of formal and informal social control to accomplish effective law in accordance with its goals.

Keywords: constitutionality; Gunungkidul; mental health; policies; suicide

Aditya Prastian Supriyadi (*Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang*)

(The Undermining of The Right to Public Participation in The Environmental Impact Analysis Regulation for a Business Permit in Indonesia: A Green Constitution Perspective)

Jurnal HAM, Volume 14, Number 1, April 2023, page 15-38

The green constitution concept in the Indonesian Constitution is the fundamental legal basis for environmental protection in implementing the national economy through public participation. The rationale for "public participation" as part of the rights of the International Covenant on Civil and Political Rights needs to be examined in the context of Law No. 2 of 2023 on Job Creation. This paper seeks to examine the components of public involvement rights that the job creation act may potentially limit, particularly the requirements on Environmental Impact Assessment (EIA) in enforcing the green constitution. This study employs normative legal research methods as well as statutory and conceptual approaches. The findings of this study reveal that the regulations for incorporating the community in the preparation of the EIA in the Job Creation Act deviate from the principles of the green constitution in two ways. First, the limits on community input in the Job Creation Act may be unlawful, as it contradicts the essence of the green constitution and the 1945 Constitution, which provide the right to public participation in environmental matters. Second, the urgency of expectations for public participation in the green constitution might become a consideration for making more transparent decisions in establishing an economy based on sustainable development. Restrictions on community participation undermine the concept of a green constitution and may reduce transparency in the awarding of business permits in Indonesia, which cannot mitigate the risk of environmental losses caused by economic exploitation.

Keywords: business permits; EIA; environmental law; green constitution; public participation right

Jurnal HAM
Volume 14 Nomor 1, April 2023
p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Mahari Is Subangun, Sudarsono Hadjosoekarto (*Department of Sociology, University of Indonesia, Jakarta*)

(Institutional Isomorphism at LPSK in Enforcement of The Rights to Psychosocial Rehabilitation for Victims of Crime in Indonesia)

Jurnal HAM, Volume 14, Number 1, April 2023, page 39-54

This study explains how isomorphism develops in the Indonesian Witness and Victim Protection Agency (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban-LPSK) and contributes to stronger coordination among institutions in administering psychological services for crime victims in Indonesia. This study employs an organizational sociology approach with an isomorphism perspective to determine the robustness of institutions' roles and relationships in providing psychosocial care to crime victims. Using the Soft Systems Methodology (SSM) in conjunction with Textual Network Analysis (TNA), this study discovered that coercive isomorphism in government organizations is the primary driving factor behind mimetic and normative isomorphism, whereas stereotyped isomorphism drives the private sector. Isomorphism emerges to give psychosocial services to victims of criminal crimes, namely as a result of reinforcement from Law Number 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims. This reinforcement prompted mimetic isomorphism in many forms of cooperation, and as a result, normatively, it is feasible to claim that LPSK has evolved into a professional institution in delivering psychological rights services to victims of criminal crimes. Furthermore, this study makes recommendations on the role of state institutions and cooperative institutions in satisfying the rights of crime victims in Indonesia, particularly psychosocial assistance.

Keywords: institutions; isomorphism; psychosocial; soft systems methodology; victims

Muh. Wahyu, Abu Bakar, Muhammad Saleh Tajuddin (*Political Science Study Program, Alauddin State Islamic University Makassar*)

(Transwomen in Pandemic: Rights, Access, and Exclusion)

Jurnal HAM, Volume 14, Number 1, April 2023, page 55-68

Transwomen must contend with the fact that the state-mandated emergency status during a pandemic does not always make it easier for them to get essential services. This is especially noticeable during times of emergency when people's movement is restricted. The homo sacer idea proposed by Agamben is used in this article to define persons who are on the brink of protection for life. This circumstance is the result of a state of emergency, which is declared by the government as a justification for a crisis that has escalated into a pretext for violence and arbitrary action. The qualitative study methodology we employ explains how the state marginalized transwomen during the Covid-19 outbreak and how transwomen advocacy organizations are attempting to advance their causes. The study's overall finding is that transwomen are seen as homo sacer by the state, which has consequences for their ability to exercise their fundamental rights to healthcare and social support during the COVID-19 pandemic. We claim that the country's institutional apparatuses' unwillingness to incorporate transgender women in the Integrated Social Welfare Data (DTKS) demonstrates the existence of transgender exclusion symptoms. Transwomen must build networks with various non-governmental organizations and advocate for their own interests in order to fight for their rights. This is true for both transwomen without ID cards and those who do not receive social assistance.

Keywords: exclusion; homo sacer; rights; transgender

Jurnal HAM
Volume 14 Nomor 1, April 2023
p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Iwan Santoso, Murtir Jeddawi, Yana Sahyana, Romli Arsyad, Alma'arif (*Postgraduate Program, Institute of Home Affairs Governance, Jakarta*)

(Gross Human Rights Violations Research Trend: A Bibliometric Analysis and Future of Research Agenda)

Jurnal HAM, Volume 14, Number 1, April 2023, page 69-90

This study aims to analyze research trends related to human rights, identify countries, organizations, and authors who contribute significantly to the aforementioned research. Furthermore, this paper identifies related articles that strongly influence these scientific publications. VosViewer collects data from Scopus Database Journal and analyzes it using bibliometric analysis. As a result of the study, the United States has the highest number of publications. Furthermore, the Department of Epidemiology at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore, Maryland, is the organization that has focused the most attention and influence on the issue of resolving gross human rights violations. Aside from that, Professor C. Beyrer of the United States is the most prolific and influential researcher on the topic of resolving gross human rights violations. Bibliometric analysis and content analysis show that the trend of resolving gross human rights violations in several countries since 2015 has been more toward resolution with non-judicial mechanisms. However, the results of the research show that several relevant articles do not provide a clear definition of gross human rights violations. Therefore, further research from other databases, such as the Web of Science, is required.

Keywords: ***bibliometric analysis; collaborative governance; content analysis; gross human rights violation; multi-stakeholder governance***

Muhammad Aenur Rosyid; Syamsul Anam (*Faculty of Sharia & Faculty of Tarbiyah, State Islamic University Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*)

(The Social Construction of Transgender in Jember Regency After the Jember Fashion Carnival Event: a Human Rights Perspective)

Jurnal HAM, Volume 14, Number 1, April 2023, page 91-104

The issue of discrimination and negative stigmatization of transgender people in the Jember Regency is considered an obstacle to the freedom of expression for every individual. This study aims to analyze the views of the people of the Jember Regency in regard to transgender women's right to freedom of expression after the Jember Fashion Carnival event. This research utilizes an empirical juridical research method with sociological approach and legal approaches. The results of this study indicate that the community's social construction of the rights of transgender expression after the Jember Fashion Carnival event is demonstrated through the community's appreciation of the transgender people's works at the event and the provision of space for their expression to develop creativity. Although the government of Jember Regency has not implemented specific policies to protect the rights of transgender people in expressing themselves and developing their potential, the government and residents of Jember have recognized the transgender community as citizens with equal rights and positions to express themselves and contribute to the progress of Jember Regency.

Keywords: ***discrimination; human rights; Jember; protection; transgender***

p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Kata Kunci bersumber dari Artikel.
Lembar Abstrak ini Disalin Tanpa Izin dan Biaya

Enggar Wijayanto (Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Konstitusionalitas Hak Kesehatan Jiwa Warga Negara: Studi Kebijakan Penanggulangan Bunuh Diri di Kabupaten Gunungkidul

Jurnal HAM, Volume 14, Nomor 1, April 2023, hal. 1-14

Angka bunuh diri di Gunungkidul yang cukup tinggi, menyebabkan Kepala Daerah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 sebagai kebijakan untuk menangani kasus bunuh diri. Langkah tersebut menjadi wujud nyata untuk menangani dan mencegah masifnya bunuh diri secara tersistematis. Jumlah rata-rata yang mencapai angka 20 hingga 30 kasus setiap tahun, menunjukkan persoalan bunuh diri bukan lagi masalah individu, melainkan telah menjadi tragedi sosial-kemanusiaan. Penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan bunuh diri, sebagai peran negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara di bidang kesehatan jiwa, melalui pendekatan interdisipliner sebagai integrated perspective untuk melihat tujuan hukum ditetapkan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris dan menggunakan pendekatan sosio-legal. Pengumpulan data diperoleh melalui data primer meliputi wawancara, observasi, dokumentasi serta data sekunder melalui studi literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan dari sisi efektivitas, kebijakan penanggulangan bunuh belum berjalan optimal berdasarkan perbandingan angka bunuh diri pra hingga pasca ditetapkannya kebijakan tersebut. Faktor yang mempengaruhi antara lain koordinasi aparat, fasilitas, dan dukungan sosial, selain itu situasi pandemi turut serta berpengaruh. Secara konseptual dan praktik, kebijakan penanggulangan bunuh diri menjadi upaya penegakan hak konstitusional warga negara melalui penguatan aspek kesehatan jiwa masyarakat dengan integrasi pengendalian sosial formal dan informal untuk tercapainya hukum yang efektif sesuai tujuannya.

Kata Kunci: bunuh diri; Gunungkidul; kebijakan; kesehatan jiwa; konstitusionalitas

Aditya Prastian Supriyadi (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Reduksi Hak Partisipasi Publik pada Aturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Perizinan Berusaha di Indonesia: Perspektif *Green Constitution*

Jurnal HAM, Volume 14, Nomor 1, April 2023, hal. 15-38

Konsep green constitution dalam konstitusi Indonesia menjadi landasan hukum dasar Perlindungan lingkungan hidup pada penyelenggaraan perekonomian nasional melalui partisipasi publik. Penalaran ”partisipasi publik” sebagai bagian hak dari International Covenant on Civil and Political Rights perlu diteliti dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis komponen hak partisipasi publik yang berpotensi direduksi oleh Undang-Undang Cipta Kerja, terutama pada ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam menegakkan green constitution. Penelitian artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan aturan pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL pada Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan prinsip green constitution dari 2 (dua) aspek. Pertama, pembatasan pelibatan masyarakat dalam Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi inskonstitusional dengan esensi green constitution pada UUD 1945 yang menjamin hak partisipasi publik di bidang lingkungan hidup. Kedua, dalam konsep green constitution, urgensi aspirasi partisipasi publik dapat menjadi pertimbangan pengambilan keputusan yang lebih transparan dalam penyelenggaraan perekonomian berbasis sustainable development. Pembatasan pelibatan masyarakat justru mereduksi konsep green constitution dan berpotensi mengurangi transparansi dalam pemberian perizinan berusaha di Indonesia dalam memitigasi risiko kerugian lingkungan akibat eksploitasi ekonomi.

Kata Kunci: AMDAL; *green constitution*; hak partisipasi publik; hukum lingkungan; perizinan berusaha

p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Kata Kunci bersumber dari Artikel.
Lembar Abstrak ini Disalin Tanpa Izin dan Biaya

Mahari Is Subangun, Sudarsono Hadjosoekarto (Departemen Sosiologi Universitas Indonesia, Jakarta)

Isomorfisme Institusional LPSK dalam Penegakan Hak Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana di Indonesia

Jurnal HAM, Volume 14, Nomor 1, April 2023, hal. 39-54

Riset ini menjelaskan bagaimana isomorfisme terjadi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Indonesia serta membantu memperkuat kerja sama antar lembaga dalam melaksanakan layanan psikososial bagi korban tindak pidana di Indonesia. Riset ini akan menggunakan pendekatan sosiologi organisasi dengan sudut pandang isomorfisme karena mampu melihat kekuatan peran dan relasi institusi dalam melaksanakan layanan psikososial bagi korban tindak pidana. Dengan menggunakan Soft Systems Metodology (SSM) yang dikombinasikan dengan Textual Network Analysis (TNA) studi ini menemukan bahwa isomorfisme koersif di instansi pemerintah menjadi pendorong utama dalam memunculkan isomorfisme mimetik dan normatif sedangkan sektor privat terdorong oleh stereotypical isomorfism. Secara khusus, dalam LPSK, isomorfisme terjadi karena adanya dorongan koersif dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan layanan psikososial kepada korban tindak pidana. Dorongan ini menimbulkan isomorfisme mimetik dalam berbagai bentuk kerja sama hingga akhirnya secara normatif, dapat dikatakan bahwa LPSK telah berubah menjadi lembaga yang professional dalam pemberian layanan hak psikososial bagi korban tindak pidana. Selain itu studi ini memberikan rekomendasi terkait peran institusi negara dan kolaborasi antar institusi kerja sama dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana di Indonesia terutama psikososial.

Kata Kunci: isomorfisme; kelembagaan; korban; psikososial; *soft systems metodology*

Muh. Wahyu; Abu Bakar; Muhammad Saleh Tajuddin (Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)

Transpuan di Masa Pandemi: Hak, Akses dan Eksklusi

Jurnal HAM, Volume 14, Nomor 1, April 2023, hal. 55-68

Di tengah pembatasan ruang gerak warga saat pandemi, transpuan diperhadapkan pada kenyataan bahwa status kedaruratan yang ditetapkan negara tidak serta merta memudahkan transpuan mengakses layanan dasar terlebih di masa darurat. Artikel ini menggunakan teori homo sacer yang diajukan Agamben untuk menggambarkan manusia yang tengah berada pada ambang batas dan status perlindungan atas hidup yang tidak jelas. Kondisi demikian merupakan produk dari state of emergency yang ditetapkan negara sebagai dalih kedaruratan yang menjelma menjadi fondasi kekerasan dan kesewenang-wenangan di masa darurat. Jenis penelitian kualitatif yang kami gunakan berfungsi untuk menjelaskan bagaimana negara mengeksklusi transpuan di masa pandemi Covid-19, dan bagaimana upaya kelompok transpuan dalam memperjuangkan kepentingannya. Kesimpulan umum pada penelitian ini adalah bahwa negara menempatkan transpuan sebagai homo sacer yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak-hak dasar transpuan untuk mendapatkan layanan kesehatan dan bantuan sosial di masa pandemi Covid-19. Penulis berargumen bahwa keengganan unit terkecil negara dalam memasukkan transpuan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menggambarkan adanya gejala eksklusi terhadap kelompok transpuan. Untuk memperjuangkan kepentingan mereka, maka transpuan harus membangun jaringan ke berbagai lembaga swadaya masyarakat dan mengadvokasi kepentingan mereka sendiri baik para transpuan tanpa KTP maupun mereka yang tidak menerima bantuan sosial kendati umumnya mereka bekerja di sektor yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yakni di sektor informal.

Kata Kunci: eksklusi; hak; *homo sacer*; transpuan

p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Kata Kunci bersumber dari Artikel.
Lembar Abstrak ini Disalin Tanpa Izin dan Biaya

Iwan Santoso, Murtir Jeddawi, Yana Sahyana, Romli Arsyad, Alma'arif (Program Pasca Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta)

Tren Riset Pelanggaran HAM Berat: Analisis Bibliometrik dan Agenda Riset Masa Depan

Jurnal HAM, Volume 14, Nomor 1, April 2023, hal. 69-90

Studi ini bertujuan untuk menganalisis tren penelitian terkait hak asasi manusia, mengidentifikasi negara, organisasi, dan penulis yang berkontribusi signifikan terhadap penelitian tersebut. Selanjutnya, tulisan ini mengidentifikasi artikel-artikel terkait yang berpengaruh kuat terhadap publikasi ilmiah tersebut. VosViewer mengumpulkan data dari Database Journal Scopus dan menganalisisnya menggunakan analisis bibliometrik. Penelitian tersebut menunjukkan Amerika Serikat memiliki jumlah publikasi tertinggi. Selanjutnya, Departemen Epidemiologi di Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health di Baltimore, Maryland, adalah organisasi yang paling memusatkan perhatian dan pengaruhnya pada masalah penyelesaian pelanggaran HAM berat. Selain itu, Profesor C. Beyrer dari Amerika Serikat adalah peneliti paling produktif dan berpengaruh dalam topik penyelesaian pelanggaran HAM berat. Analisis bibliometrik dan analisis isi menunjukkan bahwa kecenderungan penyelesaian pelanggaran HAM berat di beberapa negara sejak tahun 2015 lebih mengarah pada penyelesaian dengan mekanisme non-yudisial. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pasal yang relevan tidak memberikan definisi yang jelas tentang pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut dari database lain, seperti Web of Science.

Kata Kunci: analisis bibliometrik; analisis isi; pelanggaran HAM berat; tata kelola kolaboratif; tata kelola multi-stakeholder

Muhammad Aenur Rosyid; Syamsul Anam (Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember; Faculty of Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Konstruksi Sosial Transgender di Kabupaten Jember Pasca Acara Jember Fashion Carnival: Perspektif Hak Asasi Manusia

Jurnal HAM, Volume 14, Nomor 1, April 2023, hal. 91-104

Isu diskriminasi dan stigmatisasi negatif transgender di Kabupaten Jember dinilai menghambat kebebasan berekspresi setiap individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan masyarakat Kabupaten Jember terhadap hak kebebasan berekspresi transgender pasca acara Jember Fashion Carnival. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial masyarakat terhadap hak berekspresi transgender pasca gelaran Jember Fashion Carnival ditunjukkan melalui apresiasi masyarakat terhadap karya transgender di ajang tersebut dan pemberian ruang ekspresi mereka untuk mengembangkan kreativitas. Meskipun pemerintah Kabupaten Jember belum menetapkan kebijakan khusus untuk melindungi hak transgender dalam mengekspresikan diri dan mengembangkan potensinya, namun pemerintah dan warga Jember telah mengakui komunitas transgender sebagai warga negara yang memiliki hak dan posisi yang sama untuk berekspresi dan berkontribusi. kemajuan Kabupaten Jember.

Kata Kunci: diskriminasi; HAM; Jember; perlindungan; transgender